

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Pertama, penelitian ini dilaksanakan oleh (Liestiandre et al. 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tata Kelola Desa Wisata Berbasis CHSE di Desa Bakas Kabupaten Klungkung”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tata kelola desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dalam tata kelola desa wisata sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengelolaan desa wisata. Penelitian juga menemukan bahwa struktur organisasi yang kuat dan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dalam tata kelola desa wisata sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengelolaan desa wisata. Penelitian juga menemukan bahwa struktur organisasi yang kuat dan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata. Kesimpulan dari artikel tersebut menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan pelatihan terkait penerapan protokol kesehatan CHSE. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui kemajuan dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Kedua, penelitian ini dilaksanakan oleh (Đurkin et al. 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tourism Dependency and Perceived Local Tourism Governance: Perspective of Residents of Highly-Visited and Less-Visited Tourist Destinations*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengumpulkan data mengenai persepsi warga

terhadap tata kelola pariwisata lokal dan ketergantungan pariwisata. Teori yang digunakan berkaitan dengan hubungan antara ketergantungan pariwisata dan persepsi warga terhadap tata kelola pariwisata daerah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pariwisata dapat menjadi prediktor yang signifikan terhadap persepsi warga mengenai tata kelola pariwisata. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa partisipasi penduduk sebagai pemangku kepentingan sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat hasil yang diperoleh dan untuk memahami lebih dalam mengenai persepsi tata kelola pariwisata lokal, terutama dalam konteks dampak COVID-19

Ketiga, penelitian ini dilaksanakan oleh (Kim and Lee 2022) dalam penelitian yang berjudul “*A Tourist’s Gaze on Local Tourism Governance: The Relationship among Local Tourism Governance and Brand Equity, Tourism Attachment for Sustainable Tourism*”. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara tata kelola pariwisata lokal dan dampaknya terhadap ekuitas merek dan keterikatan terhadap pariwisata dari perspektif wisatawan domestik di Korea Selatan. Dengan menggunakan sampel sebanyak 439 kuesioner, penelitian ini mengidentifikasi komponen-komponen utama tata kelola pariwisata lokal, termasuk partisipasi, kemitraan, pelembagaan, dan sistem pendukung, serta meneliti bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi citra merek, kesadaran, dan keterikatan. Temuan penelitian mengungkapkan korelasi yang signifikan di antara konstruk, dengan tata kelola yang efektif berdampak positif pada ekuitas merek, sekaligus menyoroti perlunya indikator keberhasilan tata kelola yang terukur dan pentingnya meningkatkan pencitraan merek pariwisata lokal untuk menumbuhkan keterikatan wisatawan.

Keempat, penelitian ini dilaksanakan oleh (Xv et al. 2023) dengan judul “*Inovasi Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pengembangan growisata Berbasis Kearifan Lokal, di Kalimantan Utara, Indonesia*”. Jurnal tersebut merupakan penelitian yang fokus pada tata kelola desa wisata, khususnya di Desa Bakas dan perbandingannya dengan desa wisata lain seperti Desa Penglipuran dan Kedonganan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan

pendekatan studi kasus untuk menganalisis tata kelola desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dalam tata kelola desa wisata sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengelolaan desa wisata. Penelitian juga menemukan bahwa struktur organisasi yang kuat dan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dalam tata kelola desa wisata sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengelolaan desa wisata. Penelitian juga menemukan bahwa struktur organisasi yang kuat dan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata. Hasil Penelitian.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 *Good Tourism Governance*

Good tourism governance adalah sebuah tata kelola pariwisata yang baik. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tata kelola dalam sebuah pengembangan pariwisata yaitu dengan menggunakan konsep teori dari Drs. Bambang Sunaryo yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan agrowisata di desa Bumiaji
Dalam pengembangan sebuah pariwisata, partisipasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai pengawas atau control. Mereka terlibat di dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan pembangunan pariwisata serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan, dan digunakan untuk mengelola serta mengembangkan daya tarik pariwisata
2. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan dalam pengembangan agrowisata

Setiap pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif dan produktif. Oleh karena itu, untuk mencapai sinergitas yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dilibatkan

3. Kemitraan kepemilikan lokal dalam pengembangan agrowisata di desa Bumiaji

Kemitraan kepemilikan lokal membantu masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan. Melalui model strategi kemitraan, masyarakat seharusnya terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan usaha-usaha yang mendukung pariwisata, seperti restoran, hotel, cinderamata, dan transportasi

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut di Desa Bumiaji

Salah satu bagian penting dari program kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya alam, budaya, dan buatan yang ada harus dipelihara dan diperbaiki sesuai dengan standard yang diakui

5. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara : pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik.

6. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan harus sesuai dan serasi. Karena akan menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan pariwisata..

7. Monitor dan Evaluasi Program

Monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait seperti pemerintah desa secara langsung. Dengan memperhatikan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat. Monitor dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk

mengidentifikasi apakah program pariwisata sudah berjalan sesuai rencana atau membutuhkan penyesuaian. Dengan mengadakan pertemuan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata untuk mengevaluasi program dan melakukan perbaikan bersama.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

9. Pelatihan pada masyarakat terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan professional.

10. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (sense of place) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan BAB XII tentang pemerintah berwenang untuk memberikan pelatihan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja. Pasal 52 pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kurangnya pelatihan dan pendidikan dibidang pariwisata membuat masyarakat belum mampu mengelola potensi yang ada dengan baik, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya daya saing desa sebagai destinasi wisata. Sehingga pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga dapat mendukung

pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat lokal, optimalisasi sumber daya manusia sangat penting. Ini akan memungkinkan mereka memanfaatkan potensi pariwisata mereka dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting di dalam industri pariwisata. Sumber daya manusia pariwisata mencakup semua kualitas, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ide kreatif, dan tingkat motivasi untuk mencapai tujuan bisnis. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi.

Selain itu juga pada BAB XIII tentang Pendanaan. Pasal 57 menyebutkan bahwa pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini diatur untuk memastikan adanya sinergi yang efektif demi pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing. Pendaan ini nantinya akan sangat berguna terutama untuk pengembangan infrastruktur. Seperti jalan menuju tempat wisata, toilet umum, dan mushola.

2.2.2 Agrowisata

Agrowisata adalah sebuah pariwisata yang menggunakan pertanian sebagai objek wisata yang meningkatkan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan bisnis di bidang pertanian (Ihsan n.d.). Selain itu menurut (Septeri 2023) Agrowisata merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan aspek sektor pertanian sebagai obyek wisata, dimana tujuan dari aktivitas ini menekankan pada penambahan pengetahuan, kegiatan berwisata, dan keterkaitan antar usaha di sektor pertanian jenis wisata pedesaan ini memanfaatkan hasil pertanian atau perkebunan sebagai daya tarik wisata, dengan melibatkan masyarakat.

Pengembangan kawasan pertanian menjadi area agrowisata akan

meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan memberikan kontribusi peningkatan pendapat masyarakat melalui jasa wisata (Budiarti, Suwanto, and Muflikhati 2013). Hal ini karena Agrowisata menawarkan pengunjung kesempatan untuk melihat serta menikmati dan memperkuat suasana kehidupan pertanian dengan tinggal di sebuah pertanian kerja nyata, sementara petani dapat mempromosikan konservasi konteks pedesaan (Jamalludin et al. 2024).

Agrowisata menghadirkan potensi sumber pendapatan dan meningkatkan keuntungan masyarakat. Para pengunjung agrowisata dapat berhubungan langsung dengan para petani dan mendukung peningkatan produk-produk pertanian secara tidak langsung (Fatima 2019). Agrowisata memiliki peran dan potensi besar dalam mendukung pembangunan pedesaan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan para petani. Pengelolaan agrowisata dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, berorientasi jangka panjang, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Bentuk kegiatan agrowisata yang dapat dijumpai di Desa Bumiaji meliputi wisata perkebunan buah jeruk dan buah jambu yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kedua jenis wisata ini dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam dan pertanian yang melimpah di wilayah tersebut. Letak geografis Desa Bumiaji yang berada di lereng Gunung Arjuna dengan kondisi tanah yang subur serta iklim yang sejuk menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis buah-buahan, termasuk buah jeruk dan buah jambu. Potensi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat setempat untuk dikembangkan menjadi destinasi agrowisata yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi pengunjung.

Berdasarkan pada Perdes RPJMDes Tahun 2020 – 2025 memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji. Mekanisme partisipatif di mana seluruh pemangku kepentingan desa termasuk perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat terlibat di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, RPJMDes menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan

pariwisata yang berbasis pada potensi lokal desa.

